

Intervensi

Suara perempuan adalah suara subversif. Yaitu suara untuk mempersoalkan, dan mengubah konstelasi politik. Dari sudut pandang itu, representasi perempuan dalam parlemen harus dilihat dalam rangka ide keadilan dan bukan sekedar ide perwakilan.

Artinya, agenda politik perempuan di parlemen harus lebih besar dari agenda partai yang ia wakili. Partai berkepentingan dengan kebijakan negara. Tapi politik perempuan berkepentingan dengan keadilan substantif.

Jadi, selalu ada ketegangan antara politik partai dan agenda "kaukus perempuan". Soal inilah yang menyulitkan perempuan memaksimalkan partisipasinya dalam perjuangan politik parlemen.

Karena itu, politik perempuan memerlukan berbagai dukungan ekstra parlementer. Ia bahkan harus diselundupkan melalui "kuota", yang disebut "affirmative action". Tetapi bahkan dengan dukungan suara internasional pun, ide itu masih sulit diwujudkan. Jelas, jalan menuju representasi "suara perempuan", masih akan terganjal oleh kepentingan "suara partai".

Memang, secara ideologis, konsep "citizenship" tidak didasarkan pada kepentingan perempuan. "Citizenship" berakar pada tradisi politik laki-laki, yaitu "persaudaraan laki-laki". Ide itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi "politik perwakilan", yaitu perwakilan politik laki-laki. Jadi, sejak awal sudah ada "cacat bawaan" dalam teori "representasi" itu. Dengan kata lain, politik perwakilan perempuan, dalam upaya memperjuangkan keadilan substantif, memang harus dipikirkan sebagai politik intervensi ke dalam arus formal politik.

Kita, kini, ada dalam kesulitan itu. Formalisasi politik telah menghalangi partisipasi perempuan. Aturan-aturan pemilu dan kepartaian tunduk pada keinginan partai. Suara perempuan hanya dihitung dalam rangka

kepentingan statistik kemenangan pemilu. Itu berarti suara perempuan akan kembali diseragamkan dengan suara partai.

Implikasinya sangat jauh. Ide, kepentingan dan kebutuhan keadilan substantif yang dalam pembuatan kebijakan memerlukan perspektif etika keadilan perempuan, akan kurang diperhatikan.

Karena itu, wacana yang kini sedang diedarkan partai politik untuk merangkul perempuan, sering hanya berupa upaya menambah perolehan "suara partai", dan bukan untuk menerima "suara perempuan".

Perwakilan politik adalah fakta yang sudah melembaga. Tetapi itu bukan akhir dari politik perempuan. Pada situasi demokrasi yang masih dalam taraf transaksi kepartaian, konsolidasi politik perempuan dilatih untuk merumuskan strategi yang lebih subversif.

Karena itu, masuk dalam wacana partai, dengan etika integritas yang kuat, dan dalam dukungan jaringan masyarakat sipil yang kritis, juga merupakan cara intervensi yang cerdas.

Politik adalah menolak ketidak- mungkin. Politik perempuan adalah sumber inspirasinya. Sejarah telah menyaksikannya. **(RG)**